

PENGELOLAAN INFORMASI DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI

**DITERBITKAN OLEH:
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANDUNG (BPPKI)
BADAN LITBANG SDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DAFTAR ISI

Topik Utama

- 1 Makna Keterbukaan Informasi di Ruang Publik pada Program Bedan Editorial Media Indonesia di Metro TV
Lucy Pujasari Supratman
- 11 Meneropong Produksi Media dan Idealisme Media dalam Keterbukaan Informasi
Sapta Sari
- 27 Pengelolaan Informasi oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi
C.Suprpti Dwi Takariani
- 41 PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat
Syarif Budhirianto
- 51 Sistem Informasi Dana Kampanye Partai Politik Berbasis *Web* di Era Keterbukaan
Nana Suryana
- 59 Manajemen Informasi suatu Alternatif Ditinjau dari Perspektif Teori Efek Komunikasi Massa
Sri Wahyuningsih

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

MAKNA KETERBUKAAN INFORMASI DI RUANG PUBLIK PADA PROGRAM BEDAH EDITORIAL MEDIA INDONESIA DI METRO TV

Lucy Pujasari Supratman

DISCLOSURE OF INFORMATION MEANING IN THE PUBLIC AT PROGRAM BEDAH EDITORIAL MEDIA INDONESIA IN METRO TV

Abstract

Editorial is the attitude of a mass media on one phenomenon or emerging discourse in society. In generally, the format of each editorial is in its own media private right. It contains of arguments that based on single truth from the mass media. Unlike Editorial Media Indonesia, it has a breakthrough visualizing its editorial to public sphere in television program. It is called Bedah Editorial Media Indonesia which 'totally' elaborate the content of editorial by opening interactive dialogue segment as the representation of the openness information era. Bedah Editorial Media Indonesia program carries assertive, straight forward and honest in delivering their voices based on interactive grand theory. It proposes neutrality in critical action by voicing the truth, especially national ideology, Pancasila (five basic principles of the Republic of Indonesia), four pillars of the nation and democratic values to the audiences.

Keywords: private rights, public sphere, Bedah Editorial Media Indonesia television program

Abstrak

Editorial merupakan sikap dari sebuah media massa pada peristiwa atau wacana yang tengah berkembang di masyarakat. Format setiap

editorial pada umumnya bersifat hak privat, berisi pendapat berdasarkan argumen-argumen yang merupakan sebuah kebenaran tunggal dari media massa tersebut. Berbeda halnya dengan Editorial Media Indonesia yang meneropong pada terobosan lain melalui visualiasi tajuk rencananya ke ruang publik televisi. Program yang diangkat ke layar kaca ini bernama Bedah Editorial Media Indonesia, pada akhirnya 'benar-benar' membedah konten editorial koran dengan membuka segmen dialog interaktif sebagai representasi dari era keterbukaan informasi. Program Bedah Editorial Media Indonesia yang mengusung tegas, lugas, dan jujur bersuara ini dalam dialog interaktifnya selalu berbasiskan grand teori dengan mengusung kenetralan dalam bersikap kritis dengan menyuarakan yang sebenarnya terutama ideologi tentang kebangsaan, pancasila, empat pilar bangsa, serta nilai-nilai demokrasi pada khalayak luas.

Kata kunci: hak privat, ruang publik, program Bedah Editorial Media Indonesia

MENEROPONG PRODUKSI MEDIA DAN IDEALISME MEDIA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI

Sapta Sari

MEDIA PRODUCTION AND IDEALISM MEDIA Telescoped IN INFORMATION DISCLOSURE

Abstract

The mass media have a duty and obligation which is very important for society. The main task of journalism is to convey the truth.

KUMPULAN ABSTRAK

Delivering the truth is not an easy job, because there are factors that become an obstacle for example the interests media managers. Disclosure of the information is supported by the development of technology makes media managers compete to present information for the public. Media management is not just talk how to travel media itself since the conventional to the current interactive media, how media can carry out their duties as a theoretical perspective represented in the media, such as what is generated media production, how to media managers take advantage the disclosure of information in media production, as well as how the media itself a form of responsibility to the society associated with the production they produce.

Keywords: media production, media idealism, disclosure of information.

Abstrak

Media massa memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting bagi masyarakat. Tugas utama dari jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran tersebut bukan pekerjaan mudah, karena ada faktor yang menjadi penghambat misalnya berbentur dengan kepentingan pengelola media. Keterbukaan informasi yang didukung dengan perkembangan teknologi membuat pengelola media berlomba menyajikan informasi untuk masyarakat. Pengelolaan media tidak saja berbicara bagaimana perjalanan media massa itu sendiri sejak era konvensional sampai media interaktif saat ini, bagaimana media bisa menjalankan tugasnya seperti yang tergambarkan dalam perspektif teoritis media, seperti apa produksi media yang dihasilkan, bagaimana pengelola media memanfaatkan keterbukaan informasi dalam produksi medianya, serta bagaimana bentuk tanggungjawab media itu sendiri kepada masyarakat berkaitan dengan produksi yang mereka hasilkan kepada masyarakat.

Kata kunci: produksi media, idealisme media, keterbukaan informasi.

PENGELOLAAN INFORMASI OLEH BADAN PUBLIK PEMERINTAH PASKA REFORMASI BIROKRASI

C.Suprpti Dwi Takariani

INFORMATION MANAGEMENT BY THE PUBLIC GOVERNMENT AFTER BUREAUCRACY REFORM

Abstract

Reform of the bureaucracy was born as a form of various side desire to create a government that is clean and transparent or good governance. The consequence is the need for openness in providing information that needed by the public. Because of the public or the people has the right to obtain information and the rights guaranteed by the law. To achieve this goal it is necessary to manage the information to be easily access by the public or the people. By utilizing the development of communication and information technology. Public agency could build an information systems ICT-based, but until now not all public bodies has implement them. Lack of infrastructure and human resources in the field of ICT be obstacles.

Keywords: information management, Public Government, bureaucracy reform..

Abstrak

Reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan atau *good governance*. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

KUMPULAN ABSTRAK

masyarakat. Karena publik atau masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan informasi agar mudah diakses oleh publik atau masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Badan Publik bisa membangun sebuah sistem informasi berbasis TIK, namun hingga saat ini belum semua Badan Publik melaksanakannya. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang TIK menjadi kendalanya.

Kata kunci: pengelolaan informasi, Badan Publik, reformasi birokrasi.

PPID DAN TRANSFER INFORMASI DALAM PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT

Syarif Budhirianto

PPID TRANSFER INFORMATION AND PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN PERSPECTIVE IN WEST JAVA

Abstract

In building the PPID imaging in West Java Provincial Government as a means of information transfer towards a transparent and accountable government, public institutions need to be built user friendly that understands the needs of their communities, and can be easily accessed by the public . The relationship can be built with the education and training of human resources in the field of information and communication technology (ICT) as an agent of the provider, management , and dissemination of public information , so the faster realization of information management in facilitating the government to encourage the active participation of the community . Public interest is not limited to budget accountability

system , but in a broader perspective that can improve the quality of life . Community participation should be placed on the main role in any development that is in contact with the public interest . Administration . Jabar very open to people's aspirations and provide the widest possible space for it , but participation was not optimal when used only by certain segments of society.

Keywords: *PPID West Java Provincial Government, the transfer of information, public participation.*

Abstrak

Dalam membangun pencitraan PPID di Pemerintah Provinsi Jabar sebagai alat transfer informasi menuju pemerintah yang transparan dan akuntabel, perlu dibangun institusi publik yang *user friendly* yang memahami kebutuhan masyarakatnya serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat dibangun dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai agen penyedia, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik, sehingga terwujudnya informasi yang lebih cepat dalam memfasilitasi manajemen pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kepentingan masyarakat tidak terbatas pada sistem pertanggungjawaban anggaran saja, tetapi dalam perspektif yang lebih luas lagi yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat harus ditempatkan pada peran yang utama dalam setiap pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik. Pemprov Jabar sangat terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk hal tersebut, namun partisipasi itu tidaklah optimal bila dimanfaatkan hanya oleh segmen masyarakat tertentu saja.

Kata kunci: PPID Pemerintah Provinsi Jabar, transfer informasi, partisipasi masyarakat.

KUMPULAN ABSTRAK

SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK BERBASIS *WEB* DI ERA KETERBUKAAN

Nana Suryana

SYSTEM INFORMATION CAMPAIGN FUND POLITICAL PARTIES WEB BASED IN THE ERA OF TRANSPARENCY

Abstract

Management of campaign finance in legislative elections before a lot of attention , because it felt covered up , patgulipat , not objective and not reported truthfully or not transparent . So to not happen again , at step 2014 legislative elections anticipated by implementing information systems web -based campaign finance or Campaign Fund Web - Based Information System (CFISWB) . Performance of this system is very effective , such as data processing (revenues and expenditures) start campaign funds of storage / archiving , and analyzing the publication can be done in an objective , open and very wide range pempublikasiannya . CFISWB application so that the support of the leadership of political parties , and many contributions to worthy utilized , in favor of honesty , objectivity and transparency . Supervision was easily done by anyone . Can then close opportunities , avoid suspicious transactions and detect all the illegal funds (funds deposit , investment , loan) are entered.

Keywords: *information system, web-based and transparency.*

Abstrak

Pengelolaan dana kampanye pada pemilu legislatif sebelumnya banyak sorotan, karena kesannya ditutup-tutupi, tidak objektif, dan tidak dilaporkan sejujurnya atau tidak transparan. Untuk tidak terulang lagi, pada

pemilu legislatif 2014 langkah antisipasinya dengan menerapkan sistem informasi dana kampanye berbasis web atau *Campaign Fund Information System Web-Based* (CFISWB). Kinerja sistem ini sangat efektif, seperti proses pengolahan data (penerimaan dan pengeluaran) dana kampanye mulai dari penyimpanan/pengarsipan, penganalisisan, dan pempublikasian dapat dilakukan secara objektif, terbuka dan jangkauan pempublikasiannya sangat luas. Sehingga penerapan CFISWB yang mendapat dukungan dari pimpinan Parpol, layak dimanfaatkan dan banyak kontribusinya, dalam mendukung kejujuran, keobjektifan dan keterbukaan. Pengawasan pun mudah dilakukan oleh siapa saja. Kemudian dapat menutup peluang, menghindari transaksi mencurigakan dan mendeteksi segala dana ilegal (dana titipan, investasi, pinjaman) yang masuk.

Kata kunci: sistem informasi, berbasis *web* dan keterbukaan.

MANAGEMEN INFORMASI SUATU ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI EFEK KOMUNIKASI MASSA

Sri Wahyuningsih

INFORMATION MANAGEMENT BASED ON AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE THEORY OF MASS COMMUNICATION EFFECTS

Abstract

The television media has the main function to educate, entertain, influence. This function is a reference by the media actors and producers to compete to attract audiences in selecting channel programs presented on television. A growing number of local television and private television became intense competition in the media industry. It is very motivating players and media producers to get creative in the

KUMPULAN ABSTRAK

making of television programs for children up to adult movies, soap operas, talk shows, infotainment, and other programs, but it is a pity they do not pay attention to media management that the existing rules the KPI, P3SPSS, LSF, as well as segmentation, time, method of presentation and duration. Ideology market like this is happening in the State of Indonesia. So the shows that are presented do not rule out the possibility to have a negative effect on the audience. Analysis of the underlying theory is the theory of mass communication effects of stimulus response, agenda setting, and the theory of catharis.

Keywords: *television, information, ideology market, theories of Mass Communication Effects*

Abstrak

Media televisi mempunyai fungsi utama mendidik, menghibur, memengaruhi. Fungsi inilah yang menjadi acuan oleh para pelaku media dan para produser untuk berlomba-

lomba menarik khalayak dalam memilih *channel* program acara yang disajikan di televisi. Semakin banyak televisi lokal dan televisi swasta menjadi persaingan yang ketat dalam industri media. Hal ini sangat memotivasi para pelaku media dan para produser untuk semakin kreatif dalam membuat program acara di televisi dari film untuk anak hingga dewasa, sinetron, *talk show*, *infotainment*, dan program acara lainnya, tetapi yang disayangkan mereka tidak memerhatikan manajemen medianya yaitu aturan yang ada dalam KPI, P3SPSS, LSF, begitu pula dengan segmentasi, waktu, metode penyajiannya dan durasinya. Idiologi pasar seperti ini yang terjadi pada negara Indonesia. Sehingga tayangan-tayangan yang disajikan tidak menutup kemungkinan mempunyai efek negatif untuk khalayaknya. Analisis teori yang melandasinya adalah teori Efek Komunikasi Massa, *Stimulus Respon*, *Agenda Setting*, dan teori Kataris.

Kata Kunci: televisi, informasi, idiologi pasar, teori Efek Komunikasi Massa.

PENGELOLAAN INFORMASI DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI

Era reformasi yang telah di gulirkan beberapa waktu yang lalu, telah mendorong berbagai elemen masyarakat untuk menuntut hak dasar mereka khususnya hak untuk memperoleh informasi. Informasi merupakan hak pokok setiap orang baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Pada masyarakat modern, kebutuhan akan informasi semakin mendesak dan semakin penting.

Cartwright et al.(2001) mengatakan, dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas tersebut bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, di mana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima, dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum manusia, dan menggunakannya sebagai sarana penambah pengetahuan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dengan mudah bisa didapatkan dan hadir menyapa kita setiap saat. Meskipun perkembangan teknologi telah memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi, namun masih ada beberapa informasi yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan ranah publik. Keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi momen penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Bagi masyarakat Undang-Undang KIP merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah selayaknyalah Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Observasi edisi Juni 2014, menyajikan beberapa tulisan dengan tema “Pengelolaan Informasi di Era Keterbukaan Informasi” yang berisikan berbagai pandangan tentang bagaimana media massa dan juga Badan Publik mengelola informasi agar bisa dengan mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Ada sedikit perubahan dalam Observasi edisi kali ini yang hanya berisi 6 (naskah) dan perubahan pada halaman judul.

PPID DAN TRANSFER INFORMASI DALAM PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT

Syarif Budhirianto

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung

Jl. Pajajaran No. 88 Bandung -40173, Telp. (022) 6017493, HP. 08122393677

email: syarifbudhi@gmail.

Naskah dikirim tanggal 22 April 2014, disetujui tanggal 26 Mei 2014

PPID TRANSFER INFORMATION AND PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN PERSPECTIVE IN WEST JAVA

Abstract

In building the PPID imaging in West Java Provincial Government as a means of information transfer towards a transparent and accountable government, public institutions need to be built user friendly that understands the needs of their communities, and can be easily accessed by the public . The relationship can be built with the education and training of human resources in the field of information and communication technology (ICT) as an agent of the provider, management , and dissemination of public information , so the faster realization of information management in facilitating the government to encourage the active participation of the community . Public interest is not limited to budget accountability system, but in a broader perspective that can improve the quality of life . Community participation should be placed on the main role in any development that is in contact with the public interest . Administration Jabar very open to people's aspirations and provide the widest possible space for it, but participation was not optimal when used only by certain segments of society.

Keywords: PPID West Java Provincial Government, the transfer of information, public participation.

Abstrak

Dalam membangun pencitraan PPID di Pemerintah Provinsi Jabar sebagai alat transfer informasi menuju pemerintah yang transparan dan akuntabel, perlu dibangun institusi publik yang *user friendly* yang memahami kebutuhan masyarakatnya serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat dibangun dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai agen penyedia, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik, sehingga terwujudnya informasi yang lebih cepat dalam memfasilitasi manajemen pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kepentingan masyarakat tidak terbatas pada sistem

pertanggungjawaban anggaran saja, tetapi dalam perspektif yang lebih luas lagi yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat harus ditempatkan pada peran yang utama dalam setiap pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik. Pemprov Jabar sangat terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk hal tersebut, namun partisipasi itu tidaklah optimal bila dimanfaatkan hanya oleh segmen masyarakat tertentu saja.

Kata kunci: PPID Pemerintah Provinsi Jabar, transfer informasi, partisipasi masyarakat.

Pendahuluan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyampai informasi pada pemerintahan, mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun aspek pengelolaan keuangan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang KIP menghendaki pemerintah dan badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi agar dapat diakses secara luas oleh publik. Domain hak akses informasi merupakan hak atas transparansi pengelolaan dana/sumber daya publik, hak atas informasi yang dikelola badan publik, dan hak atas informasi untuk mengetahui kinerja pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang ini juga mengharuskan setiap lini birokrasi pemerintah termasuk di daerah harus

memiliki PPID serta membentuk Komisi Informasi (KI). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasannya. Sedangkan KI terdiri atas pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, dan kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Pelaksanaan Undang-Undang KIP di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2014 ini telah direspon cukup cepat, dan telah dikembangkan secara bertahap sampai pada tingkat kabupaten dan kota, yakni telah dibentuk PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Hal ini sebagai amanat dari Undang-Undang, bahwa daerah diberi kesempatan dua tahun untuk membentuk PPID setelah diundangkannya Undang-Undang KIP ini. Provinsi Jabar salah satu provinsi yang berhasil melaksanakannya, terbukti dengan diperolehnya penghargaan tahun 2013 lalu dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai badan publik terbaik dalam hal keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Walaupun keberadaan PPID telah memperoleh penghargaan, namun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikannya, terutama

yang menyangkut kemampuan sumber daya dalam penguasaan materi informasi yang dibutuhkan masyarakat, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kebebasan dalam memperoleh informasi yang *notabene* hanya dimanfaatkan oleh *segmen* masyarakat tertentu saja. Begitu pula respon oleh seluruh kabupaten dan kota di Jabar tidak berbanding lurus dengan keberadaan Komisi Informasi Daerah (KID) sebagai lembaga *komplementer* dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Rendahnya kabupaten dan kota membentuk KID sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaan, dikarenakan aparat/masyarakat setempat yang belum siap, dan masih mengandalkan KID Provinsi sebagai lembaga induknya untuk menyelesaikannya. Padahal kedudukan KID sangat diperlukan sebagai mediasi antara masyarakat dan badan publik dalam *mengakomodir* permintaan informasi yang diharapkan, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sengketa ini acapkali timbul sebagai respon masyarakat tertentu yang kritis terhadap kebijakan yang diambil badan publik, baik dalam perspektif teknis pelaksanaan ataupun biaya finansial yang dikeluarkan. Umumnya partisipasi masyarakat Jabar yang merespon kegiatan badan publik masih didominasi oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *intens* melakukan pengawasan struktural dari luar sistem birokrasi yang ada.

Di samping kurangnya partisipasi dari berbagai segmen masyarakat dalam menyampaikan atau merespon informasi, juga keberadaan PPID di Pemprov. Jabar masih disikapi sebagai media untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan

anggaran yang terpakai, apakah ada penyimpangan atau tidak. Padahal hakikat keberadaan Undang-Undang KIP ini, masyarakat diberi layanan informasi oleh badan publik dalam perspektif lebih luas lagi.

Adapun badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dari dalam dan luar negeri. Semua badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik kecuali: informasi yang dibuka dan diberikan kepada publik akan menghambat proses penegakan hukum; Informasi yang dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi yang dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Informasi yang dibuka dapat mengungkapkan kekayaan Indonesia; Informasi yang dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Informasi yang dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Informasi yang dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi; serta Informasi yang dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

Dalam Undang-Undang ini juga diamanatkan bahwa setiap badan publik harus memiliki PPID yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan

bertanggungjawab langsung kepada atasannya. Dengan demikian Undang-Undang ini menghendaki pemerintah dan badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses secara luas oleh publik.

Undang-Undang tersebut, memperlihatkan secara jelas mengatur bagaimana kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen, dan data yang diintegrasikan pada lembaga birokrasi/pemerintahan. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi dapat dijalankan dengan baik. Untuk menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik posisi PPID memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data dan dokumentasi pada lembaganya, sebagai bentuk tanggungjawab pekerjaannya.

Apalagi dalam era keterbukaan ini, fungsi institusi publik semacam PPID menjadi sangat penting dalam membentuk pencitraan badan publik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat yang dianggap penerapan sistem manajemen informasi yang tertutup menjadi berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*public oriented*), serta untuk membangun pola komunikasi yang lebih demokratis lagi antara pemerintah dan masyarakat. Pencitraan masyarakat, khususnya pada sektor politik dan pemerintahan seringkali dicitrakan sebagai institusi yang tertutup, terutama bila yang bersinggungan dengan teknis kinerja pemerintah dalam sistem pengelolaan anggaran yang dikerjakan. Masyarakat sulit untuk mengakses

informasi mengenai hal tersebut, padahal di sisi lain paradigma pemerintah yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Akibatnya yang terjadi adalah pola-pola komunikasi yang cenderung otokratis, informasi yang diberikanpun cenderung menjadi tidak *valid*, simpang siur, dan akhirnya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dengan kondisi yang terjadi selama belum diimplementasikan secara baik kebijakan Undang-Undang. No. 14 Tahun 2008, maka sering terjadi praktik komunikasi yang tidak sehat antara pemerintah dengan masyarakat. Padahal dalam pola komunikasi yang demokratis, diperlukan adanya ruang publik yang terbuka agar masyarakat dapat memperoleh informasi seluas mungkin mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengantisipasi hal ini, maka institusi publik, baik dalam ranah birokrasi pemerintahan maupun dalam ranah politik, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan lain-lain perlu memiliki PPID yang mampu menjembatani antara kepentingan institusi dengan kepentingan masyarakat.

PPID sebagai alat transfer informasi dapat lebih berperan dalam membangun pencitraan baru yang lebih baik tentang institusi publik terutama pada pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, yang jelas-jelas sedang meningkatkan transparansi informasi menuju pemerintah yang lebih baik (*good governance*). Adapun pencitraan yang perlu dibangun di era demokrasi ini adalah institusi publik yang *user friendly*, yang memahami kebutuhan masyarakatnya serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat dibangun bilamana ada hubungan yang terbina dengan baik antara

badan publik dengan masyarakat. Di sinilah lembaga kehumasan semacam PPID dapat berperan dalam membina hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan insan pers (radio, televisi, koran, majalah, media *online*, dan lain-lain), menciptakan citra institusi yang baik bagi kalangan tersebut akan lebih membantu lagi dalam sistem informasi yang sedang dibangun kepada masyarakat. Sebab tanpa bantuan (*back up*) dari media massa atau elektronik, desiminasi informasi yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat akan sulit ditegakkan, baik untuk menjembatani dengan kalangan pers, serta menjembatani kepentingan badan publik dengan masyarakat (*stakeholders*).

Dengan kata lain, peran PPID sebagai pendukung dari kehumasan akan lebih mem*backup* lagi dalam memberi pelayanan informasi publik yang lebih optimal, sedangkan fungsi dari kehumasan eksistensinya masih dibutuhkan bagi sistem informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan informasi dan komunikasi perkantoran. Masalahnya lembaga baru ini yang belum semua instansi pemerintah memilikinya, karena salah satu kendalanya adalah belum jelas kedudukan secara organisasional, apakah termasuk struktural atau fungsional. Apakah akan diformalkan atau lebih efektif bila bersifat informal atau lembaga ini mengikuti ketentuan sebagai bagian dari organisasi struktural di bawah salah satu sub bagian, sehingga akan lebih demokratis lagi. atau dengan membuat suatu kerangka sumber daya aparat pengelola PPID yang bersifat independen, tidak terikat pada struktur organisasi pada satuan kerja yang ada.

Keberadaan PPID perlu ditunjang oleh kejelasan visi-misi organisasi pemerintahan serta kejelasan kedudukan dan perannya dalam organisasi. Untuk mencapai hal ini, maka perlu ada komitmen dan *political will* dari pemerintah daerah untuk memperjelas kedudukan di instansinya sehingga akan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan informasi. Dengan demikian, PPID akan menjadi pintu bagi keluar masuknya informasi sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat akan dipenuhi. Apalagi pada era sekarang ini seorang PPID juga harus memahami dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), baik berperan sebagai PPID utama maupun pembantu yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peran dari internet atau portal yang dimiliki oleh pemerintah merupakan basis strategis bagi menyampaikan informasi berbagai bidang pemerintahan dan potensi yang ada, sehingga akan terwujud informasi yang cepat, tepat, akurat, dan terpercaya dalam memfasilitasi masyarakat pengguna informasi dan komunikasi.

Transparansi dan Konsep Teoretik

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan senantiasa mengedepankan transparansi/keterbukaan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. Undang-Undang ini mewajibkan kepada seluruh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun lembaga pemerintah/swasta lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)

maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyediakan informasi terkait kegiatan dan keuangan kepada masyarakat.

Masyarakat Jawa Barat berhak mengetahui program atau kegiatan yang dilaksanakan badan publik ini, karena untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang mengharuskan adanya dasar hukum, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi secara legal yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 lalu dan mulai berlaku dua tahun kemudian yaitu mulai tanggal 30 April 2010. Artinya sebagai ujung tombak implementasi dari Undang-Undang ini, keberadaan PPID dalam badan publik otomatis sudah terbentuk sebagai pejabat yang kompeten memberikan informasi kepada publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Gordon (1986), bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah atau peraturan yang berkenaan dengan informasi, perlu *administrator* untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan. Melakukan interpretasi berkenaan dengan menerjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, dan metode untuk melaksanakan program, sedangkan menerapkan berarti menggunakan instrumen sebagai tahap merealisasikan tujuan kebijakan (Widyahartono, 1992).

Sebagai garda terdepan dalam transformasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun komunikasi, keberadaan PPID sangat *urgen* dimiliki oleh setiap badan publik, bahkan mereka yang berkompeten di dalamnya harus mempunyai wawasan yang luas. Sebab keberlangsungan dan

kredibilitasnya akan ditentukan ketika publik membutuhkan segala bidang informasi yang dibutuhkan, minimal ada lima jenis informasi publik, seperti informasi serta merta, informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan.

Dengan pertimbangan adanya respon yang baik serta semangat dari seluruh kabupaten dan kota dalam melaksanakan Undang-Undang KIP, Pemprov Jabar diakui sebagai pelaksana PPID terbaik di tingkat nasional, meskipun dalam perjalanan banyak kasus-kasus informasi yang belum tuntas dilayani kepada masyarakat, hal ini sebagai indikator bagaimana antusiasnya masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan. Adapun mekanisme pelayanan informasi publik, terbagi 3 cara, yaitu: Pertama, menggunakan pelayan informasi dengan menggunakan dokumen yang tercetak, jadi ada pemohon informasi datang meminta informasi maka bisa disediakan dalam bentuk dokumen tercetak ; Kedua, pelayanan dalam bentuk internet, di mana masyarakat tinggal mengklik layanan internet melalui perangkat TIK yang dimiliki selama dua puluh empat jam; Ketiga, pelayanan informasi dengan melakukan komunikasi tatap muka langsung antara pemohon informasi dan pelayan informasi, bagaimanapun seseorang pemohon informasi yang ingin mendengarkan penjelasan langsung dari penyedia informasi dalam hal ini PPID.

Terkait dengan mekanisme pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID di Pemprov Jabar, Hoogerwerf (1983), menyatakan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilakukan apabila kebijakan tersebut telah ditransformasikan dalam bentuk program aksi kegiatan yang disertai dengan penyediaan biaya

pelaksanaan program pelayanan informasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan berbagai operasional yang dirumuskan secara rinci (*detail*), terintegrasi sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks (*complicated*) sekaligus kritis (*critical*). Program tersebut ditujukan kepada sekelompok individu yang menjadi sasaran kegiatan informasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun menghasilkan perubahan yang diinginkan (Tachjan, 2006).

Keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, termasuk keterbukaan informasi yang muncul di media dan pengumuman resmi pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan aparat dalam menginterpretasikan kebijakan yang dijabarkan dalam aturan-aturan pelaksana teknis tingkat bawahnya, rencana implementasi dan pengorganisasian sebagai suatu manifestasi dari pelaksanaan kebijakan. Kemudian kebijakan tersebut dapat diimplementasikan apabila sudah berwujud dalam bentuk program aksi kegiatan, memiliki kelompok target sasaran, adanya unsur pelaksana kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Langkah Strategis Peran PPID sebagai Agen Transformasi

Permasalahan penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik tidak lepas dari kendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi. Begitu pula keberadaan PPID Pemprov Jabar perlu mendapat perhatian kembali walaupun

secara teknis tergolong baik, tapi kadang timbul ketidakpercayaan terhadap informasi yang diberikan. Apalagi Komisi Informasi Daerah (KID) saat ini tidak berdiri sendiri dan tergantung pada keberadaan Diskominfo Jabar yang secara anggarannya maupun personalianya masih menyatu, sehingga KID yang seharusnya independen dikhawatirkan akan cenderung berafiliasi terhadap *agregasi* kepentingan satuan kerja. Hal ini bisa diterima, karena keberadaan KID atau PPID tergolong masih baru, sehingga dalam penyediaan sumber daya aparat masih minim.

Di samping mengoptimalkan peran sumber daya manusia tersebut, hingga sekarang belum ada standar yang dapat digunakan secara ideal oleh badan publik sebagai dasar untuk memberikan pelayanan informasi publik dalam pembentukan PPID di Provinsi Jawa Barat. Begitu pula dalam kehadiran PPID dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kebebasan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang KIP, meskipun sudah lama diberlakukan tentang KIP ini, namun belum semua individu dan badan publik baik yang berada di pemerintahan provinsi maupun kabupaten dan kota memahami secara optimal. Walaupun ada, kadangkala dalam memahaminya cenderung diterjemahkan dalam arti yang sempit. Kebebasan memperoleh informasi lebih diartikan sebagai kebebasan yang bersifat absolut. Artinya masyarakat di Provinsi Jabar yang meliputi 24 kabupaten dan kota belum meletakkan pada proporsi untuk menumbuhkan solidaritas kebersamaan dalam konteks membangun demokratisasi dan transparansi publik di masyarakat.

Adapun esensi yang dibangun para pencari informasi publik cenderung

mengabaikan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Ada tiga indikator yang perlu diketahui dan menjadi fokus perhatian PPID, yakni: menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memahami keterbukaan informasi; menempatkan PPID dalam struktur informasi badan publik yang ideal; serta model layanan PPID Provinsi Jabar. Dengan demikian dapat dicapai dalam mengidentifikasi pelayanan informasi publik melalui PPID serta dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, serta dapat merekonstruksi konsep struktur layanan informasi yang ideal.

Dengan kualitas sumberdaya manusia yang baik, maka otomatis penguasaan dibidang TIK akan lebih baik pula atau dalam pemanfaatan media internet akan lebih optimal bagi mendukung tugas-tugas dari PPID dalam menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, yakni akan terwujudnya informasi yang lebih cepat, tepat, akurat, dan terpercaya dalam memfasilitasi kebutuhan publik. Peran dari keberadaan *website* pemerintah Pemprov Jawa Barat dewasa ini perlu diintensifkan dalam mendukung pencarian informasi publik, yakni dengan memberikan kemudahan akses layanan data dan memfasilitasi manajemen pemerintah daerah yang lebih transparan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Pemanfaatan TIK, hal yang tidak bisa dipungkiri dalam mewujudkan transparansi informasi kepada publik, yakni: 1. Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan prioritas memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, memungkinkan terjadinya kerja sama

pemerintah dengan swasta maupun LSM dan perguruan tinggi; 2. Membangun lingkungan yang kompetitif, di mana sektor swasta dapat berperan dalam hal pelayanan publik (Muhajir, 2000).

Pola-pola informasi yang disampaikan publik selama ini perlu diubah paradigmanya, bahwa PPID bukan suatu lembaga untuk meminta informasi tentang pelaksanaan anggaran saja, begitu pula bahwa KID tidak hanya sebagai mediator sengketa informasi tentang politik anggaran yang dipakai badan publik saja. Tetapi dalam kontek yang lebih luas lagi. hal ini terjadi karena peran dari PPID maupun KID lebih banyak yang bersinggungan dengan materi ini. Berdasarkan pada informasi yang diterima PPID Pemprov Jabar maupun Komisi Informasi Daerah, ternyata hampir sebagian besar informasi yang disampaikan masyarakat adalah yang bersinggungan dengan anggaran, bahkan banyak pula jawaban yang diterima (102 kasus) kurang memuaskan masyarakat yang sampai saat ini belum ada solusi dari Komisi Informasi Daerah (KID) Jawa Barat.

Dari berbagai kasus yang diterima oleh PPID maupun KID, jelas bahwa masyarakat seolah-olah menjadi otoritas pengawas pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan badan publik, di mana badan publik harus bisa memuaskan informasi yang diminta, tanpa ditutup-tutupi sesuai dengan prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan kompetensinya.

Kurang meratanya segmen masyarakat yang terjadi pada pengajuan informasi kepada PPID Jawa Barat, hal ini karena partisipasi yang merupakan alat untuk memperoleh informasi belum berjalan, dan mereka akan lebih mempercayai program pembangunan atau kebijakan jika mereka dilibatkan dalam

prosesnya. Keikutsertaan masyarakat umumnya bergantung pada minat terhadap informasi terkait, begitu pula dalam hal untuk mengetahui informasi publik masyarakat Jabar masih rendah. Sebelum ada minat terhadap informasi, sangat sulit melihat keterlibatan langsung terhadap informasi, sebagai contoh sering diungkap kasus-kasus pejabat yang melakukan korupsi melalui media, mereka akan tertarik mengikuti alur beritanya secara *detail*, dan kemudian dia baru memberikan kontribusi pendapatnya.

Penutup

Pelayanan informasi publik di Pemprov Jabar sudah dilakukan dengan tiga cara, yaitu menggunakan pelayanan informasi dengan menggunakan dokumen yang tercetak, jika ada pemohon informasi datang meminta informasi, maka bisa menyediakan dalam bentuk dokumen cetak, pelayanan informasi melalui internet. Jadi setiap informasi seharusnya telah disediakan di internet, kecuali untuk beberapa informasi seperti yang dikecualikan, dan pelayanan informasi dengan melakukan komunikasi tatapmuka langsung antara pemohon informasi dan pelayan informasi, bagaimanapun terkadang ada pemohon yang ingin mendengarkan penjelasan langsung dari penyedia informasi dalam hal ini PPID.

Mekanisme pelayanan informasi publik dapat digambarkan dengan menggunakan bagan gambar, atau menggunakan dengan poin-poin tulisan. Selain itu diperlukan pembuatan mekanisme untuk melakukan pengklasifikasian informasi, supaya pemohon yang meminta data bisa

mengetahui informasi yang dikecualikan atau bukan.

Peran dari PPID sebagai transfer informasi kepada masyarakat, perlu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, karena partisipasi juga ditentukan oleh komitmen pemerintah, sehingga masyarakat dalam mengontrol pembangunan dapat menjadi sangat baik dan efektif. Bukan saja dilakukan oleh kalangan tertentu saja, seperti kalangan pengusaha, peneliti, LSM, wartawan, atau hanya untuk kalangan menengah ke atas melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula informasi yang datang melalui PPID harus di *backup* dari masing-masing SKPD/OPD yang menjadi perpanjangannya.

Sinergitas yang diperlukan dalam membentuk PPID yang *solid* adalah dalam hal *menginput* data di setiap SKPD, di mana mereka harus *menginput* dan memberikan laporan ke Diskominfo Jabar, karena PPID utama tidak mungkin dapat menguasai tupoksi dari banyak satuan kerja (satker) yang ada. Begitu pula dibantu oleh pejabat fungsional di masing-masing SKPD yang menguasai bidangnya masing-masing, seperti Dinas Pertanian ada penyuluh pertanian, Dinas Kesehatan ada fungsional tenaga dokter. Selain itu PPID sebaiknya bisa masuk ke pusat informasi seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain yang membutuhkan pelayanan publik. PPID juga harus selalu *mengupdate* data yang dimiliki, sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi. Dengan demikian keberadaan PPID sebagai transfer informasi bagi masyarakat yang membutuhkan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhajir, Darwin.(2005). *Good Governance dan Kebijakan Publik*, Lokakarya Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Tachjan.(2006). *Implementasi Kebijakan Publik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Puslit KP2W* Lembaga Penelitian Unpad: Bandung.
- Widyahartono,Bob.(1992). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

TENTANG PENULIS

C.Suprpti Dwi Takariani SH, M.Si, Semarang, 22 September 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Hukum Jurusan Perdata. S2 diselesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini tercatat sebagai Peneliti Madya di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI Bandung). Karya tulis yang pernah dipublikasikan antara lain "*Perilaku Pengguna Internet*", Majalah Ilmiah Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 13 No. 1 Tahun 2010. Diterbitkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. "*Study Eksplanatori Survei Pengaruh Chatting Melalui Facebook Terhadap Komunikasi Tatap Muka Remaja Dalam Keluarga*", Majalah Ilmiah Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 14 No. 2 Tahun 2011. Diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. Tanggapan Masyarakat Penerima Fasilitas Universal Service Obligation (USO) Program Desa Punya Internet. Prosiding Seminar Tahun 2012, Diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. Pengalaman di bidang penerbitan adalah sebagai ketua dewan redaksi mulai dari tahun 2009 hingga sekarang.

Lucy Pujasari Supratman, M.Si, lahir di Bandung, 17 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S2 di Jurusan Ilmu Komunikasi, Unpad (2009). Mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra di Universitas Pasundan, Fakultas Sastra di Universitas Al-Ghifari serta Fakultas Ilmu Manajemen dan Komunikasi di Institut Manajemen Telkom. Pengajar BIPA/Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (Mahasiswa Luar Negeri yang Berasal dari Turki, Turkmenistan dan Afrika). Penelitian yang pernah dilakukan: *Teaching Method thorough Mnemonic* (Unpas), *Analyzing Metaphor in Maesa Ayu's Novel* (Unpas), dan *Ebonics Language to Indonesian University Students* (Unpad). Karya tulis yang pernah diterbitkan diantaranya: *What's Valentine (Reader's Letter)*, Harian Umum Galamedia, 2007), *Tinjauan Aplikasi Budaya Literasi pada Masyarakat 'SDM' Praliterasi* (Majalah Al-Mizan No.133/2007), *Model Pendidikan Undergraduate: Mengkritisi Pencekalan Kesetaraan HAM pada Kualitas Proses Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia* (Majalah Al-Mizan) dan editor lepas buku berjudul 'Media Penyiaran Televisi' dengan penerbit IMPP-Unpad. Karya-karya fiksinya pernah beberapa kali diterbitkan pula oleh Harian Umum Galamedia.

Drs. Nana Suryana, lahir di Bandung 27 Juli 1955. Menyelesaikan S1 di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Fakultas Sosial Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Saat ini tercatat sebagai Peneliti Madya di Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pengalaman menulis di Jurnal (Jurnal Penelitian Komunikasi Bandung, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Banjarmasin), Observasi dan Prossiding, Seminar di BPPKI Bandung.

Sapta Sari, S.Sos., M.Si, lahir di Yogyakarta/21 September 1978. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Bengkulu Sumatera. Menempuh pendidikan S1 hingga selesai pada tahun 2005 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung – Konsentrasi Jurnalistik, S2 diselesaikan pada tahun 2009 di Universitas Padjadjaran Bandung – Konsentrasi Ilmu Komunikasi. Saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen di Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, Penulis dan Editor Lepas di Re!Media Service Bandung. Pengalaman menulis: "Aku dan kepribadian Indonesia" Detika Publishing 2007, "Keterampilan Menulis" Sinergi 2008, "Media Siaran TV: Di antara Masyarakat dan Kepemilikan Media " Jurnal Observasi Vol. 8 No.1 Depkominfo Bandung 2010, "Stereotip Bahasa dan Pencitraan Perempuan pada Iklan Kacamata Budaya Populer" Jurnal Observasi Vol. 10 No. 1 Depkominfo Bandung 2012

TENTANG PENULIS

Sri Wahyuningsih, S.Sos.,M.Si, Tuban, 2 Maret 1978, pendidikan formalnya diselesaikan di Univ. Muhammadiyah Malang (S1) bidang studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2001, Univ. Padjadjaran Bandung bidang studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2009. Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo, Madura dengan jabatan fungsional Lektor/IIIc Penata Muda. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain adalah Makna Simbol Jilbab Kaum Perempuan diterbitkan dalam Syaikhuna Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Cholil (Non Akreditasi) Vol. 6/No. 2/ Februari 2013, Infotainment Komunikasi Ghibah yang Terlarang diterbitkan Syaikhuna Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Cholil (Non Akreditasi) Vol. 7/No. 1/ September 2013, Realitas Kejujuran Masyarakat dalam Iklan L.A Light di Televisi versi “Yang lain bersandiwara, Gue Apa Adanya” diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi (Non Akreditasi) Vol VII No. 1

Drs. Syarif Budhirianto, lahir di Bandung, 7 Februari 1962. Pendidikan formal: Sarjana Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Katolik Parahyangan Tahun 1986. Pengalaman pekerjaan : tahun 1987 sampai dengan 1995 Pengajar di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Bandung dan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah hingga sekarang. Tahun 1989 sampai sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) RI dan sejak tahun 1994 menjadi fungsional peneliti dengan kepakaran di bidang komunikasi dan media. Karya yang diterbitkan antara lain pengembangan *Jabar cyber provinces* sebagai media informasi dan komunikasi yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Komunikasi (Thn. 2013), Peran *Chief Information Officer* Dalam Kelembagaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pemerintah Kota Depok (Thn. 2012).

PETUNJUK PENULISAN

Petunjuk Penulisan Naskah Observasi BPPKI Bandung

1. Umum

Observasi merupakan media yang terbit secara berkala dua nomor dalam setahun. Nomor 1 terbit setiap bulan Juni, nomor 2 terbit bulan November. Proses penerbitan nomor 1 berlangsung sejak awal Januari hingga Juni. Proses penerbitan nomor 2 berlangsung sejak Juni hingga November. Sebagai media pengembangan dan rekayasa ilmu yang berasal dari hasil pengamatan lapangan, pengalaman, telaahan, gagasan, tinjauan maupun kritik di bidang komunikasi, informatika, dan media.

Sasaran khalayak penyebaran ditujukan kepada masyarakat ilmiah, instansi pemerintah dan swasta serta pihak-pihak yang berminat.

Jenis tulisan berupa makalah, hasil kajian pemikiran dan, tinjauan kritis, di bidang komunikasi, informatika, dan media.

Redaksi menerima sumbangan naskah dari kalangan peneliti, akademisi, pengamat dan praktisi komunikasi, media, dan informatika. Naskah yang disumbangkan harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Jika di kemudian hari diketahui ada naskah yang dimuat di jurnal atau media lain maka segala risiko menjadi tanggung jawab penulis. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia mengacu pada EYD.

Segala macam bentuk plagiasi menjadi tanggung jawab penulis dan yang bersangkutan tidak dipekenankan untuk mengisi penerbitan di BPPKI Bandung.

Setiap naskah yang masuk akan dikaji dan ditelaah oleh Dewan Redaksi. Naskah yang masuk tidak diterbitkan menjadi hak Redaksi dan tidak dapat diminta kembali. Untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah naskah dimuat, semua naskah yang masuk ke redaksi Observasi akan ditelaah oleh Mitra Bestari sesuai dengan bidang kepakarannya. Untuk menjaga objektivitas maka setiap naskah yang di kirim ke Mitra Bestari dalam kondisi tanpa nama.

Setelah dalam bentuk *proof*, Penulis naskah diminta menandatangani lembar pernyataan persetujuan untuk dicetak menjadi jurnal.

2. Khusus

Format Penulisan:

- Naskah diketik dengan Souvenir Lt BT font 12 di atas kertas A4, spasi ganda melalui program *MS Word 2003/ Open Office Writer*.
- Naskah yang dikirim maksimal 20 halaman. Per halaman rata-rata sekitar 429 kata hingga 450 kata.
- Pengiriman dilakukan melalui *e-mail* (observasi.bppki.bandung@mail.kominfo.go.id) atau melalui *hard copy* (dilengkapi *soft copy/CDRW*) ke BPPKI Bandung, Jalan Pajajaran no: 88 Bandung – 40173, telp. 022-6017493.
- Naskah mengacu pada sistematika sebagai berikut: Judul; Nama Penulis (termasuk alamat instansi, nomor hp/faxs, *e-mail*); Abstrak; Kata kunci; Pendahuluan; Pembahasan; Penutup.

PETUNJUK PENULISAN

Penjelasan format penulisan:

Judul: Ditulis dengan singkat, padat, maksimal 10 sampai 12 kata (ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris). Isinya mencerminkan masalah pokok. Ditulis dengan huruf kapital font 14. Hindari judul penelitian dengan menggunakan kata-kata “Telaah”, “Studi”, “Pengaruh”, “Analisis”, dan sejenisnya. Hindari penggunaan kata kerja dan singkatan.

Nama Penulis (termasuk alamat instansi, nomor hp/faxs, e-mail, tgl kirim naskah):

Contoh:

Muhammad Zein Abdullah, S.Ip, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Komunikasi, Universitas Haluoleo Kendari
Sulawesi Tenggara - 93232

Telp/Fax/HP (0401) 3192511, 081341877133, *e-mail:zein_unhalu@yahoo.co.id*

Naskah dikirim pada tanggal 7 Januari 2011

Abstrak: Ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, maksimal 200 kata tanpa paragraph. Isinya harus mencerminkan latar belakang dan permasalahan, pembahasan dan implikasi. Abstrak bukan merupakan turunan dari pendahuluan.

Kata Kunci: Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris di bawah abstrak. Terdiri atas 3 sampai 5 kata. Tidak harus kata tunggal, boleh kata majemuk. Ditulis dengan huruf kecil format miring (*Italic*). Bukan kata yang bersifat Umum. Contoh judul: Membangun Format Kemitraan Media Dalam Rangka Diseminasi Informasi. **Kata-kata kunci:** Kemitraan, Media, Diseminasi Informasi.

Pendahuluan: berisi tentang latar belakang masalah; pentingnya permasalahan tersebut untuk ditelaah lebih jauh;

Kerangka konsep/analisis: perspektif pemikiran/tinjauan, bingkai analitik yang digunakan.

Pembahasan: Secara substansial isinya mencakup telaahan terhadap permasalahan dengan bingkai analitik yang digunakan. Jika menggunakan tabel, maka bentuk tabel, hendaknya menggunakan tiga garis horisontal dan tidak menggunakan garis vertikal, tabel menggunakan nomor sesuai dengan urutan penyajian (Tabel 1 , dst), judul tabel diletakan di atas tabel dengan posisi di tengah (*centre justified*) contoh :

Tabel 1

Jenis Kelamin Responden

No Jenis Kelamin	Frekuensi
1. Laki-laki	25
2. Perempuan	25
Jumlah :	50

PETUNJUK PENULISAN

Sumber :

Penutup: isinya mencakup simpulan dan saran.

Cara pengutipan : menggunakan pola *bodynote*, yakni menuliskan nama belakang penulis buku yang dijadikan sumber dan tahun terbit buku tanpa disertai halaman.

Sumber bacaan hendaknya terdiri dari minimal 60% yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir ini, dan 40% bebas.

Tidak diperbolehkan menggunakan sumber dari wikipedia, blog yang kredibilitasnya kurang.

Daftar Pustaka: Daftar pustaka ditulis mengacu pada *Standard Harvard*.

Contoh:

1. Buku (satu penulis):

Berkman, R.I (1994) *Find It Fast: how to uncover expert Information on any subject*. New York: Harper Perennial.

2. Buku (dua penulis/lebih):

Moir, A. & Jessel, D. (1991) *Brain sex: the real difference between men and women*. London: Mandarin.

Cheek, J., Doskatsch, I., Hill, P. & Waish, L. (1995) *Finding out: Information Literacy for the 21st century*. South Melbourne: MacMillan Education Australia.

3. Editor atau Penyusun sebagai penulis:

Spence, B. ed. (1993) *Secondary School Management in the 1990s: Challenge and Change*. Aspects of Education Series, 48. London: Independent Publishers.

Robinson, W.F & Huxtable, C.R.R. eds. (1998) *Clinicopathologic principles for veterinary medicine*. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Penulis dan Editor:

Breediove, G.K. & Schorfheide, A.M. (2001) *Adolescent pregnancy*. 2nd ed. Wleczorek, R.R. ed. White Plains (NY): March of Dimes Education Services.

5. Institusi, Perusahaan, Atau Organisasi sebagai penulis

UNESCO (1993) *General Information Programme and UNISIST*. Paris: Unesco, PGI-93/WS/22

6. Salah satu tulisan dalam buku kumpulan tulisan:

Porter, M.A. (1993) The Modification of Method in Researching Postgraduate Education. In: Burgess, R.G.ed. *The Research Process in Educational Setting: Ten case studies*. London: Falmer Press, pp. 35-47

7. Referensi kedua (buku disitasi dalam buku yang lain):

Confederation of British Industry (1989) *Towards a skills revolution: a youth charter*. London: CBI. Quoted In: Bluck, R., Hilton, A., & Noon, P. (1994) *Information skills In Academic libraries: a teaching and learning role in*

PETUNJUK PENULISAN

higher education. SEDA Paper 82. Birmingham: Staff and Educational Development Association, p.39

8. Prosiding Seminar Atau Pertemuan:

ERGOB Convergence on Sugar Substitutes, 1978. Geneva, (1979). *Health and sugar substitutes: proceedings of the ERGOB conference on sugar substitutes*, Guggenheim, B, ed. London: Basel.

9. Naskah yang dipresentasikan dalam seminar atau pertemuan:

Romonav, A.P. & Petroussenko, T.V. (2001) International book exchange: has it any future in the electronic age? In: Neven, J, ed. *Proceedings of the 67th IFLA Council and General Conference, August 16-25, 2001, Boston USA*. The Hague, International Federation of Library Association and Institutions, pp. 80-8.

10. Naskah seminar atau pertemuan yang tidak dikumpulkan dalam suatu prosiding:

Lanktree, C. & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). *Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA*.

Haryo, T.S. & Istiadjud, M. (1999, September). Beberapa faktor etologi meningokel nasofrontal. *Naskah dipresentasikan dalam konggres MABI*, Jakarta.

11. Sumber referensi yang berasal dari makalah pertemuan berupa poster:

Ruby, J. & Fulton, C. (1993, June), Beyond redlining: Editing software that works. *Poster session presented at the annual meeting of the Society for Scholarly Publishing*, Washington, DC.

12. Ensiklopedia:

Hibbard, J.D., Kotler, P. & Hitchens, K.A. (1997) Marketing and merchandising, in: *The new Encyclopedia Britannica*, vol. 23, 15th revised ed. London: Encyclopedia Britannica.

13. Laporan Ilmiah atau Laporan Teknis diterbitkan oleh pihak pemberi dana/sponsor:

Yen, G.G (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). (2002, Feb). *Health monitoring on vibration signatures. Final Report*. Arlington (VA): Air Force Office of AFRL.SRBLTR020123. Contract No.: F4962098100049.

14. Laporan Ilmiah atau Laporan Teknis diterbitkan oleh pihak Penyelenggara:

Yen, G.G (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). (2002, Feb). *Health monitoring on vibration signatures. Final Report*. Arlington (VA): Air Force Office of AFRL.SRBLTR020123. Contract No.: F4962098100049.

15. Tesis atau Disertasi:

Page, S. (1999) *Information technology impact: a survey of leading UK companies*. MPhil. Thesis, Leeds Metropolitan University.

Istiadjud, M. (2004) *Korelasi defisiensi asam folat dengan kadar transforming growth factor- β 1 dan insulin-like growth factor I dalam serum induk dan tulang kepala janin tikus*. Disertasi, Universitas Airlangga.

PETUNJUK PENULISAN

16. Paten:
Phillip Morris Inc. (1981) *Optical perforating apparatus and system*. European patent application 0021165A1.1981-01-07.
17. Artikel Jurnal:
Bennett, H., Gunter, H. & Reld, S. (1996) Through a glass darkly: images of appraisal. *Journal of Teacher Development*, 5 (3) October, pp. 39-46.
18. Artikel Organisasi atau Institusi sebagai Penulis:
Diabetes Prevention Program Research Group. (2002) Hypertension, Insulin, and proinsulin in participants with Impaired glucose tolerance. *Hypertension*, 40 (5), pp. 679-86.
19. Artikel tidak ada nama penulis:
How dangerous is obesity? (1977) *British Medical Journal*, No. 6069, 28 April, p.1115.
20. Artikel nama orang dan Organisasi sebagai penulis:
Vallancien, G., Emberton, M. & Van Moorselaar, R.J; Alf-One Study Group. (2003) Sexual dysfunction In d, 274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. *JUrol*, 169 (6), pp. 2257-61.
21. Artikel volume dengan suplemen:
Geraud, G., Spierings, E.L., & Keywood, C. (2002) Tolerability and safety of frovatriptan with short-and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. *Headache*, 42 Suppl 2, S93-9.
22. Artikel volume dengan bagian:
Abend, S.M. & Kulish, N. (2002) The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. *Int J Psychoanal*, 83 (Pt 2), pp.491-5.
23. Artikel Koran:
Sadil, M. (2005) Akan timbul krisis atau resesi?. *Kompas*, 9 November, hal. 6.
24. Artikel Audio-visual (Film 35mm, Program Televisi, Rekaman, Siaran Radio, Video Casette, VCD, DVD):
Now voyager. (Film 35mm). (1942) Directed by Irving Rapper, New York: Warner.
Now wash your hands.(videocassette). (1996). Southampton: University of Southampton, Teaching Support & Media Services.
25. Naskah-naskah yang tidak dipublikasikan:
Tian, D., Araki, H., Stahl, E, Bergelson, J., & Kreitman, M. (2002) *Signature of balancing selection in Arabidopsis*.Proc Nati Acad Sci USA. In press.
26. Naskah-naskah dalam media Elektronik (Buku-buku Elektronik / e-books):
Dronke, P. (1968) *Medieval Latin and the rise of European love-lyric* [internet]. Oxford University Press. Aavailable from: netLibrary
<<http://www.netLibrary.com/urlapl.asp?action=summary&v=1&bookid=22981>> [Accessed 6 March 2001].
27. Artikel Jurnal Elektronik:

PETUNJUK PENULISAN

- Cotter, J. (1999) Asset revelations and debt contracting. *Abacus* [internet], October, 35 (5) pp. 268-285. Available from: <<http://www.ingenta.com>> [Accessed 19 November 2001].
28. Artikel dalam web pages:
Rowett, S. (1998) Higher Education for capability: autonomous learning for life and work [internet], Higher Education for Capability. Available from: <<http://www.lie.mdx.ac.uk/hec/about.htm>> [Accessed 8 August 2000].
29. Artikel dalam website:
Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM. (2005) *Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM* [internet]. Yogyakarta: S2 IKM UGM. Tersedia dalam: <<http://ph-ugm.org>> [diakses 8 November 2005].
30. Artikel dalam CD-ROM:
Picardle, J. (1998) I can never say goodbye. *The observer* [CD-ROM], 20 September, 1, Available from: The Guardian and Observer an CD-ROM. [Accessed 16 June 2000].
31. Artikel dalam Database Komputer:
Gray, J.M. & Courtenay, G. (1988) *Youth cohort study* [computer file]. Colchester: ESRC Data Archive (Distributor).
32. Artikel online images (informasi visual, foto, dan ilustrasi):
Hubble space telescope release In the space shuttle's payload bay. (1997) [Online Image]. <Available from: <http://explorer.arc.nasa.gov/pub/>> SPACE/GIF/s31-04-015.glf, [Accessed 6 July 1997].
33. Artikel dalam e-mail:
Lawrence, S. (slawrence.goyh@go-regions.gsi.gov.uk), 6 July 2001. *Re:government office for Yorkshire and Humberside Information*. Email to F.Burton (f.burton@leedsmet.ac.uk).

Media dan Pemilu Presiden Tahun 2014

Tahun ini Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, setelah sebelumnya didahului dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini akan menentukan pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Peran media dalam menyukseskan pemilu presiden tahun 2014 akan sangat menentukan dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Observasi mengundang para pakar, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menulis sesuai topik di atas. Naskah bisa berupa resume laporan hasil penelitian, opini, telaahan teoritis, atau hasil pengamatan. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dilengkapi dengan abstrak dengan jumlah 100-150 kata. Diketik dengan menggunakan program MS Word 2003/Open Office dengan spasi 1,5 di atas kertas A4, panjang naskah antara 10-20 halaman, dilengkapi biodata penulis. Naskah harus asli dan belum pernah dipublikasikan media lain. Kutipan ditulis dengan sistem *endnotes*. Naskah dikirim dalam bentuk *hard copy* beserta *soft copy* ke alamat redaksi Observasi: Jl. Pajajaran No. 88 Bandung atau melalui *email*: observasi.bppki.bandung@mail.kominfo.go.id